

**STUDI PRASANGKA SOSIAL DI KECAMATAN
WAEAPO
(Sebuah Kajian Tentang Patologi Demokrasi Di Ranah
Lokal)**

**Samsul Ode.,S.IP.,M.Si
STIA BANTEN
odeaamsul@gmail.com**

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the patology analysis of local democracy that using social prejudices ethnic studies in sub Waeapo, Buru regency, Maluku province as a major indicator. Currenrlly, In the transition and consolidation of democracy in Indonesia, needed a strong integration in society. Democracy and social integration will act no maximum if strength of integration is nothing. Indonesia is a country with a high cultural diversity, differences often trigger conflicts -ethnic conflict. The consequences of multikulturalism make different ethnic social prejudices. This study tried to look and search the factors that emergence the social prejudice attitudes evolve, the role of social institutions, and the patterns of interethnic . The kind of this study is a descriptive analysis that aims to describe the symptoms as well as symptoms analyzed using a qualitative approach. The subjects in this research are public figure, citizens and local government. There are many method to collect a data in this research, participant observation, in-depth interviews and documentation studies. The results showed that the attitude of the social prejudice that occurred in the district Waeapo is caused by the strong of stereotypical attitudes that developed in two ethnic groups, the social institutions that unable to be a vehicle for adhesives in communication building, as well as the cooperation and social integration among ethnic immigrants and natives. After the discovery of gold mines, the conflict intensity becomes increase, a shift and a change in social status, social status, ethnic natives which gained quite dominant and increasing social unrest.

Keywords: Democracy, Ethnicity, Social Prejudice

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menjelaskan mengenai hasil analisis patologi demokrasi di ranah lokal yang menggunakan studi prasangka sosial antaretnis di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sebagai indikator utama. Dalam masa transisi dan konsolidasi demokrasi, dibutuhkan integrasi yang kuat dalam masyarakat. Tanpa integrasi yang kuat kemungkinan penguatan demokrasi dan integrasi sosial akan berjalan tidak maksimal. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan budaya yang cukup tinggi, berbagai perbedaan kerap kali menjadi pemicu konflik – konflik etnis. Perbedaan- perbedaan tersebut kemudia menjadi sikap prasangka sosial antaretnis yang berbeda. Penelitian ini berusaha melihat dan mencari tahu faktor –faktor yang menjadi pemicu munculnya sikap prasangka sosial yang terjadi di kecamatan waeapo. Penelitian ini bertipe deskriptif analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu gejala sekaligus menganalisa gejala tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, warga dan pemerintah daerah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap prasangka sosial yang terjadi di Kecamatan Waeapo disebabkan oleh sikap stereotip yang masih kuat berkembang di antara kedua etnis, pranata-pranata sosial yang ada belum mampu menjadi wahana perekat dalam membangun komunikasi, kerjasama dan integrasi sosial diantara etnis pendatang dan pribumi. Pasca ditemukannya tambang emas, intensitas konflik semakin meningkat, terjadinya pergeseran dan perubahan status sosial dimana status sosial etnis pribumi mengalami mengalami penguatan yang cukup dominan dan juga kerawanan sosial semakin meningkat.

Kata Kunci: Demokrasi, Etnis, Prasangka Sosial

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk. salah satu bentuk kemajemukannya adalah keragaman budaya dalam bentuk perbedaan suku bangsa dan juga kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya. Pada satu sisi, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai namun pada sisi yang lain, keragaman kultural memiliki potensi bagi terjadinya

disintegrasi atau perpecahan bangsa. Geertz (1996) mensinyalir bahwa pluralistik horizontal masyarakat Indonesia memiliki potensi konflik yang besar sehingga dapat mengganggu keutuhan bangsa. Dalam konsepnya, Geertz menyatakan pengelompokan secara horizontal secara primordial tersebut akan menyulitkan komunikasi satu sama lain, apalagi pembawaan masing-masing kelompok dalam berkomunikasi cenderung menggunakan kerangka budaya mereka sendiri. Perpecahan bangsa ditandai dengan adanya konflik horizontal antarkelompok etnis.

Konflik horizontal antaretnis yang terjadi di Indonesia seperti konflik antara etnis Dayak dengan Etnis Madura, konflik antara etnis Jawa dengan etnis Tionghoa dan juga konflik-konflik yang lain menjadikan latar belakang budaya sebagai alat pemicu. Konflik dilakukan lewat penyerangan fisik mengarah pada tataran prasangka yang paling tinggi yaitu ekstreminasi yang secara konseptual diekspresikan dalam wujud pemusnahan terhadap kelompok etnis tertentu.

Awal mula konflik disebabkan oleh mengakarnya prasangka sosial. Prasangka sosial ini dilatar belakangi adanya stereotip yang berkembang antara masing-masing etnis. Jika dibiarkan, maka ini akan menjadi bom waktu yang kemungkinan akan meletupkan konflik horizontal antaretnis di masa mendatang. Urbanisme etnis yang terlalu kuat dibungkus dengan etnosentris baik oleh pendatang maupun penduduk asli telah melahirkan sikap kontraproduktif dalam mengembangkan hidup berdampingan. Prasangka sosial misalnya, dalam banyak kasus telah menyebarkan muatan-muatan perbedaan

kelas, kekecewaan, kecemburuan, sinisme dan frustrasi. Menurut Maksom (2001), Gambaran-gambaran pemilahan sosial demikian dalam masyarakat majemuk akan terlihat semakin menegas hingga membawa pada kondisi yang lebih kritis, seperti suatu konflik yang berangkat dari masalah individu kemudian meluas menjadi konflik kolektif antaretnis

Menurut William (1977), Banyak yang menyebabkan konflik antaretnis yang tersembunyi berkembang menjadi konflik terbuka (manifest), antara lain bersumber dari tiga hal yaitu adanya ketidaksesuaian tuntutan terhadap sumber daya, ketidaksesuaian kepercayaan, standar nilai serta norma dan juga ekspresi perilaku yang afektif dan impulsif. Masalahnya adalah bagaimana suatu masyarakat beragam etnik tersebut bias terus menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungannya? Salah satu jawabannya adalah bagaimana masyarakat itu mampu mengelola dinamika kehidupannya. Hal ini berkenaan dengan kehandalan berbagai teknik untuk mencegah dan mengatasi setiap konflik-konflik yang terjadi.

Pengelolaan keharmonisan hubungan antaretnis pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik, yang tidak terlepas dan sekaligus merupakan perwujudan dari pengelolaan konflik tersebut mulai dari konflik laten hingga manifest, agar fungsional terhadap perbaikan hubungan selanjutnya.

Pulau Buru sebagai salah satu gugusan pulau dari kepulauan Maluku, merupakan salah satu daerah yang menjadi daerah pengasingan para tahanan politik pasca berakhirnya kekuasaan orde lama dan kemudian juga menjadi

salah satu daerah tujuan program transmigrasi pada zaman orde baru. Eksodus etnis pendatang ke Pulau Buru dimulai sejak pertengahan 1969. Mereka yang rata-rata merupakan para tahanan politik tersebut diasingkan ke Pulau buru sampai dengan tahun 1972 sejumlah 10.625 orang. Di Kecamatan Waeapo yang terdiri atas 18 desa definitif dan 41 dusun merupakan daerah transmigrasi yang majemuk dihuni oleh etnis pendatang dari suku Jawa, Sunda, Madura, Banyuwangi, Buton, Bugis, Ambon, Ternate, Sula, maupun etnis pendatang lainnya, sedangkan etnis pribumi merupakan kelompok minoritas di daerah ini.

Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana hubungan antaretnis di Pulau Buru, khususnya di Kecamatan Waeapo, yang merupakan daerah yang didominasi oleh etnis pendatang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana interaksi sosial yang terjadi, peran pranata sosial dalam menjembatani hubungan antar etnis, analisis sikap prasangka sosial sebagai indikator hubungan antaretnis serta bagaimana pola integrasi sosial yang terjadi antaretnis.

Pada intinya, integrasi nasional di Indonesia membutuhkan integrasi sosial, karena negara Indonesia sebagai negara multikultur memerlukan sebuah keselarasan sosial dalam membangun sebuah keselarasan nasional. Dalam hal ini, mengambil sudut pandang multikultural, yakni sikap saling menghormati atau menjaga kestabilan hubungan sosial dengan saling menghormati antar suku, etnis, atau agama. Dari sebuah integrasi sosial, tentunya hal ini akan membentuk sebuah inetgrasi nasional yang impelemntasinya akan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi dalam masyarakat

yang telah tertata dan terjaga tentunya akan membuat sebuah kehidupan bernegara akan mengalami tingkat yang sempurna dalam proses kehidupan sosial-budaya serta bidang lainnya.

Melly G. Tan, menyatakan bahwa wujud integrasi ideal adalah keadaan ketika individu-individu dalam masyarakat saling menghargai, sedangkan faktor kesukuan, keturunan, agama, atau jenis kelamin tidak dipersoalkan. Pola integrasi, komunikasi dan interaksi sosial yang dikembangkan sebagai upaya meminimalisasi adanya peluang kecemburuan ekonomi dan ketegangan sosial antara penduduk pendatang dengan penduduk asli. Dengan adanya integrasi antaretnis, melalui cara membangun kondisi saling menerima akan memperkecil tingkat konflik yang terjadi di masa yang akan datang.

Berangkat dari fenomena diatas, Adapun permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana proses munculnya prasangka sosial diantara etnis pendatang dan etnis pribumi di Kecamatan Waeapo, Bagaimana peran pranata sosial dalam membangun hubungan antaretnis di Kecamatan Waeapo dan Bagaimana Hubungan antaretnis diantara etnis pendatang dengan etnis pribumi di Kecamatan Waeapo. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab masalah yang hendak diteliti yakni Untuk mengetahui proses munculnya prasangka sosial antara etnis pendatang dan etnis pribumi di Kecamatan Waeapo, Untuk mengetahui peran pranata sosial dalam membangun hubungan antaretnis di Kecamatan Waeapo serta Untuk mengetahui pola hubungan antaretnis diantara etnis pendatang dengan etnis pribumi di Kecamatan Waeapo.

Penelitian ini menggunakan acuan teori demokrasi sebagai patokan utama, kemudian disusul dengan teori pendukung seperti pluralisme, konflik, etnis, interaksi sosial, stereotip, prasangka sosial, pranata sosial, dan integrasi sosial.

Sejak awal dekade 1970-an, terdapat penyempurnaan fokus terhadap kemungkinan demokratisasi dalam masyarakat-masyarakat yang terpecah-belah. Dilandasi gelombang ketertarikan akan demokrasi telah diakui bahwa pemerintahan demokratis, dibandingkan oligarki atau otoritarianisme, merupakan prospek terbaik untuk mengelola perpecahan sosial yang tajam. Tampak bahwa demokrasi benar-benar diperlukan untuk mengelola perdamaian di dalam masyarakat yang terpecah-belah. Tinjauan optimis mengenai potensi demokrasi ini menjadi dorongan kuat dari apa yang dikenal sebagai “Gelombang Ketiga” demokratisasi yang bermula pada dekade 1970-an dan semakin cepat pada awal 1990-an, yang melipat-tigakan jumlah pemerintahan demokratis di seluruh dunia.

Demokrasi, seperti juga sistem politik lainnya, bukan tanpa kekurangan dalam dunia yang tidak sempurna ini. Tetapi dalam ketiadaan alternatif yang lebih baik, pengalaman dari seluruh dunia meyakinkan kita bahwa struktur demokratis, dalam kemungkinannya yang tak terhingga, bisa menawarkan sarana penanganan damai bagi konflik yang mengakar melalui kerangka kerja yang saling terbuka, adil dan dapat dipercaya. Sistem demokratis dalam pemerintahan memiliki derajat legitimasi, kemampuan saling terbuka, fleksibilitas dan kapasitas untuk beradaptasi terus menerus yang

memungkinkan konflik yang mengakar dikelola secara damai. Terlebih lagi, dengan membangun norma perilaku negosiasi, kompromi, dan kerjasama di antara aktoraktor politik, demokrasi sendiri mempunyai efek menenangkan dalam sifat hubungan politik antara rakyat dan antara pemerintah. Melihat dilema demokrasi plural, kita dapat melihat bahwa setiap bangsa pasti memiliki kemajemukan agama, etnis-kultural, pluralitas sosial.

Indonesia sebagai negara yang plural akan terus menghadapi ancaman disintegrasi yang dapat menggoyahkan negara. Karena itu bangsa Indonesia perlu terus mencurahkan tenaga untuk memperkuat sistem demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial yang ditetapkan melalui empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Masyarakat plural seperti Indonesia, perbincangan mengenai relasi antara agama, demokrasi, dan multikulturalisme merupakan tema yang selalu menarik dan tak ada habis-habisnya untuk didiskusikan. Cita-cita mewujudkan demokrasi hampir selalu menyinggung agama dan keragaman budaya, karena demokrasi tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa menempatkan agama secara benar dan memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil persinggungan agama-agama akan mendatangkan masalah bagi stabilitas demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita kerap dihadapkan pada kenyataan banyaknya konflik dan ketegangan yang dipicu oleh sentimen keagamaan.

Pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. berbicara tentang konsep pluralisme, sama halnya membicarakan tentang sebuah konsep kemajemukan atau keberagaman”, dimana jika kembali pada arti pluralisme itu sendiri bahwa pluralisme itu merupakan suatu “kondisi masyarakat yang majemuk”. Kemajemukan disini dapat berarti kemajemukan dalam beragama, sosial dan budaya. namun yang sering menjadi isu terhangat berada pada kemajemukan beragama. Pada prinsipnya, konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya maka lahirlah pluralisme itu. Dalam konsep pluralisme bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan „klaim kebenaran“ (truth claim) yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama.

Model multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”. Banyak undang-undang dan konstitusi di Indonesia yang mengatur tentang multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, yaitu misalnya Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ada juga Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” Dalam keanekaragaman dan kejamakan bangsa Indonesia, negara melalui Undang-Undang telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang

lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut. Pancasila diharapkan menjadi ideologi yang mampu menjadi jalan tengah sekaligus jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia. Yaitu Pancasila, yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama ini. Termasuk dalam hal ini Pancasila haruslah terbuka. Harus memberikan ruang terhadap berkembangannya ideologi sosial politik yang pluralistik.

Konflik selalu ada dan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama manusia masih hidup, tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini. Ilmuwan yang menyelidiki tentang sejarah lahirnya negara seperti Thomas Hobbes dalam teorinya tentang perjanjian masyarakat (kontrak sosial) berpendapat bahwa kehidupan manusia pada awalnya adalah kehidupan yang kacau-balau dan saling menakutkan. Menurutnya, keadaan manusia sebelum adanya negara, diumpamakan sebagai serigala bagi sesamanya. Solly Lubis (1990), menjelaskan pendapat Hobbes menyangkut keadaan manusia sebelum terbentuknya negara sebagai suatu suasana kehidupan yang tidak tentram karena manusia dipimpin oleh egoismenya yang tidak dibatasi. Di pihak lain, Dahrendorf, berpendapat bahwa konflik merupakan fenomena yang selalu hadir dalam setiap masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kepentingan diantara kelompok-kelompok masyarakat merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan.

Alo Liliweri (2005) mendefinisikan konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Michael E. Brown (2007) mengidentifikasi sebab-sebab konflik internal dalam dua kategori, yaitu sebab-sebab pokok (underlying causes) dan sebab-sebab pemicu atau katalis (proximate causes). Sebab-sebab pokok merupakan suatu kondisi atau situasi yang membuat suatu wilayah memiliki potensi yang besar untuk tersulut konflik. Menurut Brown, ada empat kategori dari sebab-sebab pokok

suatu konflik yaitu faktor struktural yang mencakup antara lain yaitu kondisi negara yang lemah, permasalahan keamanan, geografi, dan etnis.

Bila ditelusuri lebih jauh, salah satu kegagalan pemerintah suatu negara untuk melaksanakan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakatnya termasuk didalamnya upaya untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis didalam masyarakat, karena didalam negara itu selalu terjadi konflik dalam masyarakat dimana pemerintah maupun masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola konflik-konflik tersebut. Sebagaimana halnya dalam upaya memahami konflik harus dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, aktor, dan mekanisme konflik, maka untuk membangun perdamaian sebagai upaya untuk mencapai suasana damai, tentu dibutuhkan perhatian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi, aktor dan mekanisme yang harus ditempuh untuk menjaga suasana damai atau menuju suasana damai itu.

Faktor- faktor yang mempengaruhi perdamaian antara lain yaitu struktur, kultur, identitas dan sebagainya. Aktor adalah semua masyarakat dengan ujung tombaknya terletak pada para pemimpin dalam segala lini, dalam hal ini pemimpin politik dan pemerintahan, pemimpin dalam struktur-struktur sosial budaya, pemimpin ekonomi, pemimpin agama, pemimpin keluarga, dan sebagainya serta agen-agen perdamaian yang memiliki pengetahuan dalam membangun perdamaian sebagai katub pengaman.

Konflik etnis di Indonesia selama ini lebih disebabkan oleh pertentangan antara etnis pendatang dan etnis pribumi. Menurut Saefullah (2002), memahami migrasi penduduk tidak sekedar diamati dari sisi demografis dan ekonomis, tetapi juga dari sisi sosial budaya yang memungkinkan perbedaan nilai antara penduduk pendatang dan penduduk setempat memahami sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Beberapa konflik yang terjadi di banyak daerah merupakan pengalaman pahit ketika integrasi antara pendatang dan penduduk setempat sudah berjalan puluhan tahun. Kebijakan otonomi daerah saat ini juga dapat menjadi ancaman tersendiri jika tidak ada pembaruan dalam memahami pola-pola adaptasi karena justru akan memperlebar gap posisi migran dan penduduk setempat. Keban (1966) mengidentifikasi kecenderungan adanya konflik etnis adalah lebih diakibatkan oleh perbedaan suku dan sosial budaya, sebagai suatu situasi krisis yang sangat potensial untuk mengarah pada disintegrasi nasional. Keban mengingatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan prioritas perhatian terhadap wilayah-wilayah tujuan migrant yang rawan atau mempunyai sejarah konflik karena perbedaan nilai-nilai budaya antara penduduk pendatang dan penduduk setempat.

Kondisi demikian jika dicermati selaras dengan pendapat Sukamdi (2002) yang menjelaskan ulang pendapat mason. Pertama, konflik muncul karena benturan budaya. Terdapat banyak bukti bahwa perbedaan budaya antarkelompok masyarakat mempunyai potensi untuk menimbulkan benturan budaya, mulai dari skala kecil atau ringan sampai dengan konflik rasial yang

melibatkan negara. Istilah penduduk asli dan pendatang sebenarnya merupakan salah satu manifestasi betapa identitas kelompok dalam masyarakat selalu muncul. Hal ini tidak selalu dalam konteks etnis, tetapi jauh lebih luas. Kedua, adalah kelompok yang berpendapat bahwa akar permasalahan yang menimbulkan konflik itu dapat dijelaskan melalui pendekatan ekonomi-politik. Konflik dilihat sebagai hasil kolaborasi antara kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi pada tingkat nasional dan lokal sehingga menumbuhkan sikap resistensi warga masyarakat terhadap lembaga negara dan kapital. Ketiga, kesenjangan ekonomi dianggap sebagai penyebab berkembangnya kecemburuan sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam ini baru akan terjadi apabila setiap orang maupun kelompok saling bekerja sama, saling berinteraksi dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dimana yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh masyarakat, pemerintah daerah,

warga etnis pendatang, warga etnis pribumi dan juga pemerhati masalah sosial. Situs penelitian berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi wilayah penelitian adalah beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Maluku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yakni Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan informan. Informan pertama dalam penelitian ini adalah masyarakat etnis pendatang dan etnis pribumi, kepala desa, kepala petuanan (adat), camat, tokoh masyarakat dan pemerhati masalah sosial. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, studi literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah arsip yang akan diperoleh dari media massa, database dari pemerintah daerah, kecamatan, dan desa serta tulisan atau kajian-kajian yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan informan sebagai teknik utamanya, kemudian peneliti juga menggunakan teknik observasi partisipatif yang artinya bahwa peneliti mengikuti setiap prosesi yang ada dalam masyarakat. sebagai penunjang, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka untuk mendapat data-data tertulis yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yaitu Reduksi data yang dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian diikuti dengan Penyajian data yaitu pemaparan data yang telah diperoleh, sebagai persiapan untuk melakukan analisis dan kemudian pada akhirnya melakukan penyimpulan data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi Pada tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang akan dibuat. Beberapa cara yang dilakukan dalam tahap ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan, pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat.)

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan serta hasil observasi partisipatif dan dokumentasi selama berada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan patologi demokrasi di ranah lokal yang menggunakan studi prasangka sosial di Kecamatan Waeapo sebagai indikator utama dalam penelitian ini. Untuk membahas hasil penelitian tentang patologi demokrasi di ranah lokal, maka penulis membagi menjadi tiga bagian utama yaitu fenomena prasangka sosial, peran pranata sosial dan juga hubungan antaretnis.

Fenomena Prasangka Sosial yang terjadi di Kecamatan Waeapo disebabkan oleh masih tingginya stereotip etnis antaretnis yang ada. Stereotip atau stereotip yang ada, baik positif maupun negatif menandakan masih belum terbangunnya persepsi dan komunikasi yang baik antaretnis. Selain stereotip antaretnis, fenomena prasangka sosial di Kecamatan Waeapo juga terjadi karena adanya perbedaan nilai antaretnis, salah satu contohnya adalah perbedaan etos kerja diantara etnis pendatang dengan etnis pribumi sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antar kedua belah pihak. Adanya kesenjangan tersebut kemudian bermuara pada bias persepsi, baik etnis pribumi terhadap etnis pendatang maupun sebaliknya. Selain adanya stereotip dan juga perbedaan nilai, fenomena prasangka sosial di Kecamatan Waeapo juga dikuatkan dengan perilaku etnosentrisme etnis yang menguat. Perilaku etnosentrisme etnis semakin dikuatkan oleh pola jarak sosial yang cenderung mendekatkan atau menjauhkan diri dari kelompok lain. Jarak sosial yang terjadi di Kecamatan Waeapo dipengaruhi oleh pemukiman atau lokasi domisili yang masih didominasi oleh pemukiman atau tempat tinggal yang homogen. Bentuk terakhir dari prasangka sosial yang terjadi di kecamatan waeapo adalah adanya diskriminasi. Hanya saja dalam observasi, penulis belum menemukan bentuk perilaku diskriminasi secara kelompok yang terjadi di kecamatan waeapo. Menurut hasil wawancara dengan informan, sangat subyektif untuk menentukan terjadinya diskriminasi karena lebih cenderung bersifat penilaian yang subyektif.

Dari Semua faktor-faktor yang ada, membuat interaksi dan komunikasi lintas etnis berjalan dengan kurang baik dan tidak efektif. Prasangka sosial bisa dikatakan menjadi bibit konflik yang potensial mengakar dalam tatanan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Adanya bias persepsi menyebabkan munculnya penilaian û penilaian yang cenderung negatif antara satu etnis dengan etnis lain. Dari adanya penilaian yang cenderung sepihak tersebut menyebabkan persinggungan ûpersinggungan yang tentunya akan bermuara pada konflik komunal.

Peran pranata sosial dalam menjembatani hubungan antaretnis di kecamatan waeapo belum berjalan dengan maksimal. Pranata Pendidikan merupakan pranata yang sangat penting dalam hal menjembatani relasi hubungan antar etnis, dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi sikap toleransi, peranan sosial, interaksi dan integrasi dengan orang lain. Nilai pendidikan setidaknya menjadi acuan seseorang dalam melihat kepatutan sosial untuk bersikap dan berperilaku terhadap orang lain. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pranata pendidikan yang ada di Kecamatan Waeapo belum mampu menjadi solusi dalam menjembatani hubungan antaretnis. Faktor- faktor yang menghambat antara lain:

1. Faktor sosial, yakni masih terjadi kesenjangan pendidikan antara etnis pendatang dan etnis pribumi dimana masih belum tingginya minat sekolah etnis pendatang.

2. Faktor budaya, yakni *kawin piara* (Menikah siri) dalam lingkungan etnis pribumi turut menghambat generasi muda untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi.
3. Faktor geografis, lembaga pendidikan yang ada kurang menjangkau etnis pribumi, sebagian besar sekolah menengah dan kejuruan justru terletak di lokasi pemukiman etnis pendatang sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Faktor politik, yakni rendahnya posisi tawar etnis pribumi dalam bidang politik sehingga tidak ada sosok tokoh panutan untuk meningkatkan kesadaran untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan etnis pribumi selama ini hanya sebatas jargon kampanye calon kepala daerah ataupun calon legislatif yang implementasinya belum efektif di lapangan

Pranata budaya diharapkan terjadinya integrasi budaya antar etnis pendatang dan etnis pribumi. Namun yang terjadi di Kecamatan Waeapo justru sebaliknya, belum terjadi integrasi budaya secara maksimal. Hal ini dapat dipahami, karena tingkat heterogenitas budaya yang cukup tinggi di Kecamatan Waeapo sehingga memungkinkan masing-masing kebudayaan berjalan di jalur yang berbeda-beda. Dewan adat etnis pribumi misalnya, belum bisa terintegrasi dengan etnis pendatang karena masih kurangnya intensitas interaksi yang terjadi antara kedua belah pihak. Persoalan lain yang turut merenggangkan hubungan antar etnis pribumi dan etnis pendatang adalah masalah tanah adat

yang tak pernah kunjung selesai dan menjadi konflik tertutup yang terus mengancam dishamoni antara kedua belah pihak.

Peran pranata yang lain adalah pranata politik. Peran pranata politik di Kecamatan Waeapo dapat dijelaskan dengan menengok kembali peran pranata politik secara garis besar di kabupaten buru. Pasca orde baru, Secara umum dalam pemetaan politik lokal di Kabupaten Buru pengaruh etnis lokal masih dominan. Konsepsi putra daerah masih sangat menguat. Perekrutan CPNS selalu diwarnai dengan intrik-intrik ôputra daerahö sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Padahal seleksi CPNS harus jujur dan obyektif serta bebas dari nepotisme. Namun pada kenyataannya, dalam skala yang lebih tinggi (kabupaten) proses seleksi penerimaan CPNS sampai penempatan selalu dibumbui aroma “putra daerah”. Pasca pengumuman CPNS yang lolos seleksi, selalu diwarnai dengan aksi demonstrasi menuntut pemerintah untuk memperhatikan aspirasi “putra daerah”. Inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial setiap adanya proses seleksi CPNS.

Realitas observasi di lapangan menunjukkan bahwa interaksi antaretnis dalam pranata ekonomi yang ada di kecamatan waeapo ditunjukkan dengan adanya sebatas hubungan transaksi dalam perdagangan atau jasa-jasa lainnya. Di luar daripada itu pranata ekonomi yang ada belum menciptakan harmoni antara etnis pribumi dengan etnis pendatang karena adanya dominasi ekonomi dalam aktivitas pasar yang rata-rata dipegang oleh etnis pendatang yang direpresentasikan oleh Etnis Jawa dan etnis cina. Interaksi ekonomi dalam aktivitas pasar cukup baik walaupun ada kesenjangan, dimana etnis pendatang

lebih mendominasi dalam penjualan skala menengah hingga besar. Etnis pribumi hanya bertumpu pada penjualan hasil kebun seperti sayur-mayur maupun hasil tangkapan di laut.

Sektor Pertanian yang diharapkan mampu menjadi pranata ekonomi untuk mengintegrasikan kedua etnis, justru lebih melambungkan kedudukan etnis pendatang yang direpresentasikan oleh Etnis Jawa. Perbedaan etos kerja, pemahaman terhadap konsep pertanian yang penulis curigai sebagai faktor yang mampu menjawab mengapa belum mampunya kedua etnis terintegrasi lewat pranata ekonomi. Namun sektor pertanian yang ada

di Kecamatan Waeapo sejak ditemukannya tambang emas mulai memudar daya jualnya. Telah terjadi alih profesi yang cukup mendasar diantara kedua etnis. Etnis pribumi telah menjadi tuan tanah bagi setiap pendatang yang ingin menyewakan lahan tersebut untuk menambang emas, sedangkan etnis pendatang justru lebih banyak alih profesi dari petani menjadi penambang. Hal ini cukup berdampak pada ketahanan pangan yang ada di Kecamatan Waeapo pada khususnya maupun Kabupaten Buru pada umumnya.

Hubungan Antar Etnis di Kecamatan Waeapo meliputi pembahasan tentang hubungan antar etnis pendatang dengan etnis pribumi di kecamatan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dan merujuk pada indikator hubungan antaretnis, temuan yang didapat antara lain:

1. Intensitas interaksi yang terjadi belum berjalan dengan baik karena belum terjalinnya komunikasi yang baik dan efektif

2. Kesenjangan sosial yang terjadi menyebabkan adanya bias persepsi dan prasangka yang bermotifkan kecemburuan sosial
3. Pola integrasi belum tercapai dengan baik karena belum adanya integrasi sosial yang maksimal. Integrasi pendidikan dan integrasi lingkungan sosial belum berjalan dengan efektif.
4. Pola asimilasi. Untuk mengukur pola asimilasi yang terjadi di Kecamatan Waeapo, maka peneliti menggunakan model studi asimilasi yang dikemukakan oleh Gordon (1978) yang membagi tiga model asimilasi dasar yaitu:
 - a. pertama, Pola asimilasi konformitas. Konformitas merupakan istilah umum yang menunjuk pada suatu jenis asimilasi dimana tidak ada oposisi terhadap pendatang sepanjang kelompok pendatang berupaya menyeragamkan diri dengan standar-standar yang secara umum diterima masyarakat setempat.
 - b. Kedua, Pola Asimilasi Persenyawaan yaitu suatu model asimilasi dimana dalam model ini semua kelompok etnis bercampur menjadi satu sehingga membentuk budaya dan masyarakat baru yang didasarkan pada prinsip persaudaraan manusia.
 - c. Ketiga, Pola Asimilasi Kemajemukan Budaya yaitu Pola ini terjadi apabila nilai-nilai kelompok baik mayoritas maupun minoritas tetap menjunjung tinggi

identitas budaya mereka yang berlainan, tetapi berupaya mencapai kesatuan ekonomi dan politik.

Dari tiga pola asimilasi diatas, pola yang terjadi antar kedua etnis di Kecamatan Waeapo adalah kombinasi antara pola pertama dengan pola kedua dan dalam proses menuju pola ketiga. Adapun analisa yang penulis asumsikan yaitu: 1. Etnis pendatang menerapkan strategi mengalah dan main aman (*safe mode*) dalam proses adaptasi di lingkungan kecamatan waeapo. 2. Etnis yang majemuk telah membentuk kultur yang ada di kecamatan waeapo pada khususnya maupun di Kabupaten Buru semakin beragam.

Semua proses dan dinamika etnisitas yang terjadi di kecamatan waeapo maupun kabupaten buru secara keseluruhan adalah suatu proses panjang menuju konsolidasi budaya yang plural. Walaupun membutuhkan waktu dan dinamika sosial yang cukup lama, namun hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merespon maupun mengawal proses mediasi dalam setiap gejolak sosial yang terjadi.

5. Pola akomodasi. Berdasarkan hasil temuan observasi di lapangan Pola akomodasi yang terjadi dalam hubungan antaretnis di Kecamatan Waeapo yaitu Tuntutan etnis pribumi agar membuat lahan pertanian berbasis kearifan lokal tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah. Lahan-lahan tanaman sagu justru terus dihilangkan untuk membangun pemukiman baru. Pemerintah daerah sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi sering gagal dalam

menangani masalah-masalah yang ada di Kecamatan Waeapo seperti masalah tanah adat, banjir maupun konflik komunal yang terjadi.

6. Pola adaptasi. Pola adaptasi dalam tataran hubungan antaretnis di Kecamatan Waeapo dapat dijelaskan sebagai berikut Etnis pendatang cenderung mengalah serta menghindari konflik terbuka dengan etnis pribumi. Untuk bertahan hidup, tiada cara lain selain berusaha keras, menerapkan etos kerja yang tinggi, membuka akses jaringan serta berusaha menguasai sumber-sumber ekonomi seperti pasar, pertanian, perkebunan dan sebagainya, Menguasai jaringan politik yang ada di kecamatan maupun di kabupaten serta Cenderung memilih tempat tinggal dengan komposisi penduduk yang heterogen
7. Pola segregasi. Untuk mengukur pola segregasi yang ada di kecamatan waeapo dapat dilihat dari persebaran desa-desa yang ada di Kecamatan Waeapo . Persebaran desa-desa yang terkategori dalam desa adat, desa homogen dan desa heterogen menunjukkan bahwa masih adanya pemisahan lingkungan tempat tinggal antara etnis pendatang dengan etnis pribumi. Kemungkinan Hal tersebut dilatar belakangi oleh dua hal yaitu adanya pengaturan dari pemerintah dalam setting sosial maupun sebagai strategi adaptasi maupun motivasi tersendiri terutama bagi etnis pendatang. Dapat dikatakan bahwa variabel lokasi penelitian merupakan faktor yang determinan, dalam artian bahwa variabel lokasi pemukiman dapat dijadikan sandaran untuk melihat sikap, perilaku dan strategi

adaptasi dari individu maupun kelompok etnis dalam kesehariannya terutama dalam hal menjalin hubungan interpersonal dengan individu yang lain dalam tataran hubungan antaretnis.

C. PENUTUP

Proses menuju konsolidasi dan transisi demokrasi memerlukan dukungan dari segenap elemen seperti masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya dukungan, partisipasi serta implementasi sikap-sikap demokratis dari masyarakat dan pemerintah maka akan terwujud sebuah kehidupan masyarakat sipil yang terbuka (*open civil society*).

Demi mewujudkan kepentingan integrasi nasional dalam hal ini mulai dari integrasi politik, ekonomi, sosial serta budaya, sudah saatnya negara Indonesia perlu mengadopsi kebijakan kemajemukan budaya. Kebijakan-kebijakan yang mengadopsi kemajemukan budaya diharapkan mampu merekatkan masyarakat yang pluralis dalam dua pilar yang penting yakni kesatuan politik dan juga kesatuan ekonomi. Jika pemerintah mengabaikan hal ini maka akan berbuah kegagalan dalam mewujudkan masyarakat terbuka dalam negara yang plural dan majemuk ini. Kegagalan atau kegagalan tersebut akan menyulut terjadinya konflik-konflik komunal yang mengatasnamakan perbedaan sebagai sumbu pemicu.

Konflik komunal selama ini bersumber dari tataran lokal dimana dalam ranah lokal masih terjadi penguatan-penguatan golongan atas nama suku, agama, ras dan sebagainya. Solidaritas kelompok justru tidak digunakan sebagai sumber untuk merekatkan hubungan masyarakat lintas budaya

melainkan sebagai ajang penguatan sikap etnosentris yang kemudian diwujudkan dalam sikap prasangka sosial antaretnis.

Kecamatan Waeapo memiliki tingkat heterogenitas budaya yang cukup tinggi, permasalahan yang patut diperhatikan adalah bagaimana etnis pendatang maupun etnis pribumi mereaktualisasikan simbol kebhinekaan yang selama ini menjadi simbol demokrasi dan pemersatu bangsa dalam perspektif ketahanan sosial budaya. Kebijakan - kebijakan pemerintah daerah hendaknya tidak ôbias etnikö, agar dicapai keselarasan dan keseimbangan hubungan antaretnis. Langkah ini penting sebagai upaya meminimalkan terjadinya kesenjangan dan kecemburuan kolektif antaretnis. Selain itu, Pemerintah daerah, tokoh adat, serta segenap masyarakat di Kecamatan Waeapo perlu membuka dan menggalakkan dialog dan diskusi sehingga ada keterbukaan hubungan dan toleransi dalam memandang eksistensi masing-masing etnis. Dengan adanya dialog dan komunikasi membuat interaksi antar etnis dapat berjalan dengan harmonis sehingga akan melahirkan rasa kebersamaan dan sikap saling menghargai. Langkah yang perlu ditempuh untuk menjembatani hubungan yang harmonis antaretnis adalah optimalisasi kembali peran pranata-pranata sosial yang ada di Kecamatan Waeapo. Pranata ûpranata sosial yang ada diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menyongsong komunikasi , kerjasama dan hubungan lintas budaya di kecamatan waeapo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arbain, Taufik. (2009). *Strategi Migran Banjar*. Yogyakarta: LKiS
- Astuti, Renggo Dan Sigit Widiyanto. (1998). *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi InteraksiAntaretnis di Kelurahan Gadang Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan*. Jakarta: Bupara Nugraha
- Durverger,Maurice. (2007). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo
- Habib Achmad. (2004). *Konflik Antaretnik di Pedesaan : Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: Lkis
- Harris, Peter Dan Ben Reilly. (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator* .Depok : AMEEPRO,
- Idrus Muhamad. (2009) *Metode Penelitian Ilmu Sosial. Edisi kedua*. Jakarta: Erlangga
- Idrus,Muhamad. (2007) *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press
- Liliweri,Alo. (2005). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS
- Moeloeng, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Moestahal Achmadi. (2002). *Dari Gontor ke Pulau Buru: Memoar H. Achmadi Moestahal*. Yogyakarta: Syarikat
- Nordholt Henk Schulte Dan Gerry Van Klinken. (2007) *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: yayasan obor Indonesia
- Nugroho Fera Dkk (2004) *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal* . Salatiga: Pustaka Percik
- Rahardjo, Djoko Mudji Dan Sri Guritno. (1998). *Budaya Masyarakat Perbatasan: Hubungan Sosial Antargolongan Etnik yang Berbeda di Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Bupara Nugraha
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo

Sutirto, Tundjung W. (2000). *Perwujudan Kesukubangsaan Kelompok Etnik Pendatang*. Surakarta: Pustaka Cakra Taqwa

M. Ridhah Dkk. (2008) *100 Tahun Kebangkitan Nasional dalam Berbagai Perspektif: Klaster Ekonomi dan Politik, Sosial dan Humaniora*. Yogyakarta: HMP UGM

Waeleruny, Samuel. (2010). *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Warsito, Rukmadi Dkk. (1984) *Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman* . Jakarta: Rajawali

JURNAL

Turnomo Rahardjo.2010. *Memahami Kemajemukan Masyarakat Indonesia (Perspektif Komunikasi Antarbudaya)* dalam Forum, Vol. 38- No.2, September 2010.

INTERNET

Rizqa Lutfi, *Multikulturisme dan Pluralisme*. Diakses dalam (<http://blog.ugm.ac.id>), pada 24 juni 2011